TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGHENTIAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN PASAL 273 AYAT 2 UU NO 17 TAHUN 2023

Stepanus Agung Laksono¹, M. Fakhri², Ria Wierma Putri³
Stepanusagung2306@gmail.com¹
Universitas Lampung

Abstrak: Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 273 ayat 2 yakni berupa hak untuk menghentikan pelayanan kesehatan karena mendapat perlakuan yang mengintervensi kebebasan dan otonomi tenaga medis dalam memberikan pelayanan. Penghentian pelayanan kesehatan tersebut akan berdampak bagi tenaga medis, pasien maupun entitas layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis, selain harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus sesuai dengan kode etik kedokteran (KODEKI 2012). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab tenaga medis yang menghentikan pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 273 tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (yuridis-normatif). Teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum tenaga medis yang menghentikan pelayanan kesehatan meliputi tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab terapeutik, tanggung jawab hukum berupa administrasi mulai dari sebelum, saat dan sesudah pelayanan, perdata, dan pidana serta tanggung jawab berdasarkan etika.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Penghentian Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis.

Abstract: One form of legal protection for medical doctor in UU No 17 Tahun 2023 concerning Health is contained in Pasal 273 ayat 2, in the form of the right to withdraw treatment that interferes with the freedom and autonomy of medical doctor in providing services. The termination of health services will have an impact on doctors, patients and health service entities. Health services performed by medical doctor, in addition to being subject to applicable laws and regulations, must also be in accordance with the medical code of ethics (KODEKI 2012). The problems that will be discussed in this research are: How is the responsibility of medical personnel who stop health services based on Pasal 273. This research is a normative research with a statutory approach (juridical-normative). The theory used is the theory of legal responsibility. The results of the research analyse that the legal responsibility of medical personnel who stop health services includes responsibility based on therapeutic responsibility, legal responsibility in the form of administration starting from before, during and after service, civil, and criminal as well as responsibility based on ethics.

Keywords: Responsibility, Termination of Health Services, Medical Doctor.

PENDAHULUAN

Perbaikan pelayanan kesehatan merupakan salah satu urgensi yang mendasari perlunya pembaharuan undang undang (UU) kesehatan. Disrupsi kesehatan nasional pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) menjadi faktor pemicu untuk memperbaiki pelayanan kesehatan nasional. Transformasi tersebut membutuhkan regulasi landasan yang kuat dan komprehensif. Walaupun diwarnai protes oleh organisasi profesi di bidang kesehatan UU No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk dalam hal banyak ditambahkan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi: “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” Selain itu setiap warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara diskriminatif sesuai dengan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945. Tenaga medis sebagai salah satu komponen utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai harkat dan martabatnya.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga medis dalam UU No 17 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 273 ayat 2 “Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan”. Hal tersebut merupakan hal yang baru yang dalam peraturan sebelumnya yakni UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran belum ada.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, selain harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 menjelaskan salah satunya terkait kewajiban dokter terhadap pasien. Kewajiban tersebut menjadi acuan bagi dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Hal ini tentu akan menjadi bahan yang kontraproduktif terhadap UU No 17 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 273 ayat 2.

Munculnya pasal dengan pembahasan baru tentang penghentian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, menjadikan pasal ini menarik dan belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang telah yang dipublikasi terkait penghentian pelayanan kesehatan tentang penghentian pelayanan kesehatan dikarenakan permintaan pasien atau keluarga. Penghentian pelayanan tersebut dilakukan dengan informed consent penolakan perawatan lanjutan dari pasien/keluarga. Pengkajian terhadap hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum perjanjian dan disimpulkan bahwa kedudukan informed consent pulang atas permintaan sendiri adalah terpenuhinya syarat terbentuknya suatu perjanjian dan sebagai alat bukti nyata penolakan atau keputusan perjanjian oleh pasien atau keluarga pasien.

Potensi konflik bisa terjadi dengan adanya Pasal 273 ayat 2 UU No 17 Tahun 2023 adalah pelayanan di instalasi gawat darurat dimana pasien dalam kondisi sakit berat tetapi keluarga yang sedang kalut atau emosi tidak mengerti tentang prosedur dan penjelasan penanganan medis yang dilakukan, sehingga melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Tenaga medis dalam kondisi tersebut akan dalam kondisi sulit untuk menghentikan pelayanan kesehatan walaupun dalam kondisi yang tertekan secara fisik dan mental.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka akan dibahas mengenai Bagaimana tanggung jawab tenaga medis yang menghentikan pelayanan kesehatan? Ruang dalam penelitian ini adalah bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup objek kajian penelitian ini terkait Pasal 273 ayat 2 UU No 17 Tahun 2023 yakni penghentian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta

nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan dan lebih khususnya yang dilakukan oleh pasien maupun keluarga pasien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (yuridis-normatif). Teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab hukum. Data kepustakaan tersebut adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga medis sebagai tenaga profesional bertanggungjawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Saat menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan pasien. Tanggung jawab tenaga medis sebagai tenaga yang memiliki profesi dalam tindakan medis terdiri dari beberapa tanggungjawab diantaranya sebagai berikut:

1) Tanggung jawab Etis

Dalam hubungan sosial, manusia dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku mereka dalam pergaulan di Tengah masyarakat. Agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing hubungan antara dokter dengan pasien maupun dengan masyarakat, akan selalu dibatasi oleh norma atau kaidah yang akan dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.

2) Tanggung jawab profesi

Semua profesi memiliki resiko yang harus dihadapi karena negara kita adalah negara yang berdasakan hukum maka tidak ada orang yang kebal terhadap hukum, sehingga penegakan hukum harus harus pula kita hormati. Seseorang yang memiliki profesi tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Tanggung jawab profesi merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan apabila tidak dilakukan maka bisa menimbulkan akibat hukum.

3) Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Dokter sebagai tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Profesi dokter adalah suatu profesi yang disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Para profesional senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual serta bersama mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat hal yang baik baginya.

Analisis dari segi hubungan hukum antara dokter dan pasien dapat terjadi dari dua aspek, yaitu hubungan melalui kontrak (terapeutik) dan hubungan melalui undang-undang (zaakwarneming). Dalam hubungan kontrak, dokter dan pasien dianggap sudah sepakat untuk membuat perjanjian saat dokter mulai melakukan tindakan medis terhadap pasien, sementara hubungan melalui undang-undang muncul karena kewajiban yang diberikan kepada dokter. Dalam kontrak terapeutik, hubungan dimulai dengan pertanyaan jawab (anamnesis) antara dokter dan pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan kadang dibutuhkan pemeriksaan diagnostik untuk mendukung dan menegakkan diagnosis nya, seperti pemeriksaan radiologi atau laboratorium.

1. Tanggung jawab dalam transaksi terapeutik

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan keahliannya. Untuk memeriksa hubungan hukum antara dokter dan pasien dapat dimulai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau orang lain.

Dalam hal ini, jelas adanya hubungan antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien, tempat pasien membutuhkan keahlian dokter untuk penyembuhannya, dan dokter memiliki keahlian atau pengetahuan untuk berkontribusi dalam penyembuhan pasien. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya perjanjian di antara mereka yang mengikatkan diri, kemampuan para pihak untuk membuat suatu kewajiban, hal atau objek tertentu yang dijanjikan, dan sesuatu yang halal.

1. Sepakat

Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri dalam kontrak terapeutik berarti kesepakatan antara pasien dan dokter. Sebab, jika tidak ada kesepakatan, tindakan medis dokter tidak akan terjadi.

2. Kecakapan Para Pihak

Kemampuan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Pihak pasien dari ketentuan ini disyaratkan orang yang cakap membuat akad, yaitu dewasa dan berakal. Demikian pula dokter dan tenaga kesehatan lainnya, selain memenuhi hal tersebut di atas juga wajib memiliki keahlian dibutuhkan oleh pasien, baik itu dokter umum ataupun spesialis tentunya keahlian yang diperoleh secara sah dengan adanya bukti-bukti seperti yang ijazah atau sertifikat asli.

3. Sesuatu Hal Tertentu

Adapun yang dimaksud dengan sesuatu di sini tidak terpaku pada jumlahnya, tetapi mengacu pada kondisi yang mampu diatasi oleh dokter.

4. Sesuatu yang halal

Adapun yang dimaksud halal disini adalah akad yang tidak melanggar hukum. Contohnya aborsi ilegal atau mengubah wajah melalui bedah plastik untuk menghindari penangkapan polisi.

Unsur pertama dan kedua disebut unsur subjektif karena unsur ini secara langsung melibatkan orang atau subjek dalam perjanjian. Apabila salah satu unsur subjektif tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permohonan pihak yang bersangkutan. Unsur ketiga dan keempat merupakan unsur objektif karena kedua unsur ini berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum atas permohonan para pihak yang bersangkutan atau secara *ex officio in*, keputusan hakim, atau perjanjian, dianggap tidak pernah ada.

Penghentian pelayanan kesehatan oleh tenaga medis menjadikan kontrak tersebut tidak dapat terpenuhi secara utuh. Transaksi terapeutik sebagai perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana tenaga medis sebagai subyek dalam perjanjian memiliki harus kecakapan yang sesuai kompetensi dan standar pelayanan (unsur kecakapan).

Pasal 273 ayat 2 dalam Undang-undang No 17 Tahun 2023 yang memuat hak tenaga medis untuk menghentikan pelayanan kesehatan, juga mengandung syarat bahwa tenaga medis wajib melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien seperti termuat dalam Pasal 272 ayat 1 (a) UU Kesehatan.

Contoh kasus tindakan kekerasan keluarga pasien terhadap dokter di Puskesmas Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung yang terjadi pada April 2023 akibat pihak pasien tidak puas dengan pengobatan yang diberikan oleh dokter. Dokter yang sedang bertugas adalah

dokter intership. Dokter intership merupakan dokter magang yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat (kemenkes) ke unit pelayanan baik di RS maupun di Puskesmas. Hal yang perlu menjadi pembelajaran adalah penting adanya standar operasional pelayanan sesuai kompetensi yang dimiliki oleh unit pelayanan kesehatan, sehingga meminimalisasikan keluhan ketidakpuasan terhadap pelayanan terutama oleh pemberi pelayanan terutama oleh tenaga medis yang sedang magang (residen).

Dalam transaksi terapeutik tidak semua perjanjian tertuang secara tertulis dalam informed consent, kadang juga penawaran yang diberikan oleh tenaga medis secara lisan dan pasien menyetujuinya secara lisan. Hal ini sering terjadi pada tindakan yang sifatnya non invasif atau dengan minimal resiko. Perjanjian lisan tersebut berdasarkan Pasal 1571 KUHPerdara dapat diputuskan secara sepihak, dalam hal ini dapat diputuskan oleh tenaga medis yang memberikan pelayanan. Penghentian pelayanan kesehatan pada tindakan non invasif dan minimal resiko dapat dihentikan secara sepihak dan tidak wajib mendapat persetujuan dari keluarga/pasien.

Pihak lain yang terlibat dalam transaksi terapeutik adalah instansi penyelenggara kesehatan baik rumah sakit, dan klinik. Pihak penyelenggara pelayanan kesehatan sering kali mendapat gugatan secara perdata terkait tindakan-tindakan tenaga kesehatan yang dianggap merugikan pasien. Rumah sakit/klinik/instansi fasilitas kesehatan juga penting memiliki regulasi terkait perlindungan hukum untuk tenaga medis termasuk terkait penghentian pelayanan kesehatan ini. Adanya standard prosedur penghentian pelayanan kesehatan dapat menjadi acuan dan mengurangi penyimpangan pelayanan kesehatan yang merugikan pihak tenaga medis maupun rumah sakit.

Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban ini merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu yang tercermin sebagai kewajiban bagi pihak lain. Penghentian pelayanan kesehatan oleh tenaga medis, tenaga medis berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ketidaknyamanan yang diterima, namun disisi lain tenaga medis juga memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional dan keilmuan yang dimiliki, dan pasien memiliki kewajiban untuk mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis serta mematuhi peraturan yang berlaku di fasilitas kesehatan tersebut. Sebaliknya, pasien memiliki hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu dan menolak atau menyetujui tindakan medis.

2. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dokter tidak hanya terkait dengan aspek medis, tetapi juga terkait dengan aspek hukum. Hal ini karena secara hukum setiap perjanjian akan menciptakan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut atau meminta ganti rugi dari pihak yang dianggap melanggar.

a. Aspek Administrasi

Tenaga medis sebagai wakil negara dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di bidang kesehatan, tidak dapat begitu saja bertindak melakukan praktik kedokteran tanpa adanya peraturan yang mengaturnya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang semula privat kini telah meluas dan menjadi ranah hukum publik, ditandai dengan masuknya perangkat hukum administrasi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.

Pada hakikatnya, hukum administrasi adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau antar organisasi dalam pemerintahan. Hukum administrasi hadir sebagai bentuk perlindungan dan jaminan atas terselenggaranya pelayanan kesehatan secara maksimal. Tanggung jawab tenaga medis berdasarkan hukum administrasi negara yang dimaksud adalah bahwa tenaga medis sebagai warga negara yang menjalankan profesinya harus tunduk pada hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dan berlaku dengan profesi kedokteran, seperti perizinan dihadapan

dokter, dokter gigi bisa praktik kedokteran, praktik prosedur, dan sebagainya.

Seorang tenaga medis dikatakan melanggar hukum tata usaha negara (mala-praktik administrasi) apabila tercermin dari perbuatan dokter tersebut apabila melakukan praktik kedokteran tanpa izin, melakukan tindakan kedokteran yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya, praktik menggunakan izin yang telah habis masa berlakunya, dan tidak membuat rekam medis. Alasan yang mendasari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 260 menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib melakukan registrasi lewat Konsil sebagai perwakilan menteri. Kewajiban selanjutnya bagi tenaga medis terkait dalam pelayanannya wajib memiliki izin praktik seperti dijelaskan dalam Pasal 263 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam sebuah artikel terkait penghentian pelayanan kesehatan yang diinisiasi oleh tenaga medis, Julie Brightwell dan Richard Cahill menjelaskan beberapa komponen yang sebagiannya tertulis dalam rekam medis pada saat dilakukan penghentian pelayanan:

1. Alasan
2. Tanggal efektif: Tanggal efektif untuk mengakhiri hubungan harus memberi pasien waktu yang wajar untuk menjalin hubungan dengan praktisi lain. Meskipun 30 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis biasanya dianggap memadai. Hubungan dapat segera diakhiri dalam keadaan berikut:
 - a. Pasien telah mengakhiri hubungan.
 - b. Pasien atau anggota keluarga telah mengancam penyedia atau staf dengan kekerasan atau telah menunjukkan perilaku mengancam.
 - c. Pasien berpartisipasi dalam pengalihan narkoba, pencurian, atau kegiatan kriminal lainnya yang melibatkan praktik.
 - d. Pasien menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau pelanggaran seksual terhadap penyedia layanan.
3. Ketentuan perawatan sementara
4. Ketentuan perawatan lanjutan:
5. Catatan pasien
6. Transisi perawatan
7. Kelanjutan pemberian obat

Kelengkapan administrasi diatas sebagai syarat untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan baik dan aman dari segi administrasi. Selain hal tersebut, tanggung jawab administrasi saat melakukan pelayanan juga diperlukan dalam rangka menjadi alat bukti apabila dikemudian hari diperlukan. Hal yang dimaksud adalah kelengkapan rekam medis yang sesuai dengan standar operasional pelayanan yang berlaku di rumah sakit yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Rekam medis elektronik yang diselenggarakan tersebut memiliki prinsip keamanan data berupa kerahasiaan, integritas; dan ketersediaan. Jangka penyimpanan untuk rekam medis elektronik lebih lama dibandingkan rekam medis manual yakni selama 25 tahun.

b. Aspek Perdata

Tenaga medis memiliki beberapa tanggung jawab yang terkait dengan hukum perdata, di antaranya adalah tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam sebuah perjanjian atau kontrak (wanprestasi). Hal ini bertujuan untuk mengompensasi kerugian yang dialami akibat terjadinya wanprestasi. Beberapa contoh aksi yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi termasuk tidak melakukan apa yang diperjanjikan, terlambat, melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau melakukan sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran menurut perjanjian.

Tenaga medis juga memiliki tanggung jawab terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH dibagi menjadi tiga kategori: sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dan kelalaian yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Untuk mengajukan gugatan PMH, harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. adanya kerugian pada salah satu pihak
2. adanya kesalahan atau kelalaian
3. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan kesalahan
4. perbuatan tersebut melawan hukum

Gugatan atas dasar wanprestasi dan tindakan melanggar hukum tidak bisa dengan mudah diganti atau diubah sesuai keinginan. Untuk mengajukan gugatan wanprestasi, diperlukan adanya sebuah kesepakatan atau perjanjian. Ketika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian terapeutik, maka pasien dapat melakukan gugatan perdata sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata, yaitu dalam bentuk: pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian; dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Dari sebuah perjanjian tercipta sebuah perikatan usaha, tenaga medis harus berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyembuhkan pasien. Tenaga medis wajib melakukan perawatan dengan hati-hati sesuai dengan sumpah dokter dan perikatan dengan pasien.

Dalam istilah hukum, ketika tenaga medis dan pasien pertama kali bertemu, tidak jarang mereka membuat kesepakatan. Masalah di kemudian hari yang timbul berakibat para pihak dapat meminta kompensasi berdasarkan pelanggaran kontrak karena pelanggaran kontrak mungkin juga melibatkan tindakan melawan hukum. Beberapa jenis perbuatan yang dianggap melawan hukum, antara lain cedera janji, ketika terjadi kegagalan dalam perbuatan kedokteran yang telah diperjanjikan dengan pasien atau keluarganya melalui informed consent yang dituangkan dalam Pasal 1243-1289 KUH Perdata. Selain itu, kelalaian medis sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1366 KUH Perdata terjadi apabila suatu tindakan medis menimbulkan luka atau kerugian pada pasien.

Tenaga medis sebagai subyek diketahui bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak, maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus yang melibatkan tindakan melawan hukum, tindakan dokter harus dipertanggungjawabkan dan dihukum oleh hukum. Oleh karena itu, ukuran yang digunakan untuk menentukan kesalahan tidak lagi didasarkan pada standar individu yang subjektif, tetapi lebih pada kemampuan dokter untuk bertindak secara wajar dan masuk akal. Akibatnya unsur kesalahan dalam pelanggaran kontrak dan pelanggaran hukum sering kali minim.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab tenaga medis mengacu pada gagasan kompensasi dalam kasus yang kelalaian medisnya atau kesalahan telah terjadi. Terkait dalam penegakan disiplin bagi tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
- 2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
- 3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- 4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad hoc.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi adalah upaya pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan demi keuntungan mereka sendiri. Biaya mediasi menjadi tanggung jawab pihak yang berperkara.

c. Aspek Pidana

Masyarakat semakin menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam bidang kesehatan, saat ini banyak permasalahan timbul akibat kelalaian dokter yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan dengan bukti kelalaian atau kesalahan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai malapraktik pidana apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan itu harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan dengan sikap mental yang salah, seperti kesengajaan, kecerobohan, atau kelalaian.

1) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kesalahan atau kelalaian medis dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain di dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) terkait penelantaran pasien:

Pasal 428: Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang Pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; dan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Pasal 432: Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

2) Berdasarkan Undang-undang Kesehatan

Pengaturan hal-hal yang terkait pertanggungjawaban pidana berupa sanksi berkaitan dengan praktik tenaga medis yang menghentikan pelayanan dapat ditemukan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan antara lain:

- Tanggung jawab kasus kegawatdaruratan

Tenaga Medis ikut bertanggung jawab dalam kasus kegawatdaruratan sesuai dengan Pasal 438 UU No 17 Tahun 2023. Adapun pasal tersebut berisi: Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kedisabilitas atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Pertanggungjawaban pada kelalaian dan timbulnya kerugian

Tenaga medis dalam menghentikan pelayanan berpotensi mendapatkan tuntutan dari keluarga/pasien terkait Pasal 440 UU No 17 tahun 2023. Adapun isi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada tersebut mengakibatkan kematian, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Pertanggungjawaban Pada Kasus Kejadian Luar Biasa/Wabah

Potensi tanggung jawab yang akan dituntutkan oleh keluarga pasien/pasien apabila pelayanannya dihentikan seperti termuat dalam Pasal 446 UU No 17 Tahun 2023

d. Aspek Etik

Keputusan tidak merawat atau tidak memberikan pelayanan kesehatan dapat dibedakan menjadi withholding treatment (tidak memulai sesuatu pelayanan) dan withdrawing treatment (menghentikan pelayanan kesehatan). Keputusan ini dalam bioetik sering dikaitkan dengan prinsip nonmaleficence. Hal ini merupakan bagian dari 4 prinsip bioetik yang dikembangkan Beauchamp dan Childress, yang berisi autonomy, nonmaleficence, beneficence, dan justice. Otonomi berarti setiap tindakan medis haruslah memperoleh persetujuan dari pasien (atau keluarganya terdekat, dalam hal ia tidak dapat memberikan persetujuannya), beneficence berarti setiap tindakan medis harus ditujukan untuk kebaikan pasien, nonmaleficence berarti setiap tindakan medis harus tidak boleh memperburuk keadaan pasien, dan justice berarti bahwa sikap atau tindakan medis harus bersifat adil—terutama dilihat dari segi distributive-justice. Penghentian pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis terkait dengan Pasal 273 ayat 2 ini dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan (Justice).

Etik dalam disiplin ilmu kedokteran dinilai dari standar profesi dan Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012. Dalam kode etik tersebut kewajiban dokter dikelompokkan menjadi kewajiban umum (Pasal 1 sampai Pasal 13), kewajiban dokter terhadap pasien (Pasal 14 sampai Pasal 17), kewajiban dokter terhadap teman sejawat (Pasal 18 dan Pasal 19) dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri (Pasal 20 sampai Pasal 21).

Dalam hal penghentian pelayanan kesehatan oleh tenaga medis apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan beberapa pasal dari KODEKI yang berkaitan antara lain:

- Pasal 2 Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 3 yang menyebutkan “Seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian”. Dalam kedua pasal ini tenaga medis profesional diharapkan mandiri dan dalam kondisi yang tanpa tekanan dalam mengambil keputusan, adanya tindakan yang menekan akan berakibat dapat menurunkan profesionalisme.
- Pelayanan kepada pasien dalam KODEKI 2012 diatur dalam Pasal 14 Seorang Dokter wajib bersikap tulus dan ikhlas dan mempercayakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Pelayanan yang bersifat gawat darurat diatur dalam Pasal 17 menyatakan kewajiban dalam melakukan pertolongan gawat darurat sebagai wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya

KESIMPULAN

Penghentian pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis yang termuat dalam pada Pasal 273 ayat 2 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan latar belakang jika menerima perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya

termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan dalam aspek tanggung jawab tenaga medis yang menghentikan pelayanan kesehatan meliputi tanggung jawab dalam transaksi terapeutik, tanggung jawab administrasi, perdata, pidana dan etika.

Tanggung jawab administrasi yang dimaksudkan adalah teregistrasi tenaga medis yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi, berlakunya surat izin praktek dan kelengkapan rekam medis yang digunakan saat melayani pasien. Tanggung jawab perdata terkait dengan tidak terpenuhinya kewajiban yang disepakati dalam transaksi terapeutik, perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab medis dalam hukum perdata, mengacu pada kompensasi dalam kasus yang kelalaian medisnya atau kesalahan telah terjadi. Tanggung jawab yang berpotensi ditanggung oleh tenaga medis secara pidana adalah terkait pelayanan kegawatdaruratan, kelalian dan timbulnya kerugian dan kasus luar biasa/wabah. Selain itu tanggung jawab etik dalam penghentian pelayanan terkait pelayanan yang independen kepada pasien secara tulus dan ikhlas mempergunakan keilmuan dan keterampilannya dan merujuk ke sejawat yang lebih berkompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Annisa Putri Nauli, Muhammad Syaifuddin dan Helena Primadianti, 2022, *Pulang Atas Permintaan Sendiri Sebagai Alasan Penghentian Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien Di Rumah Sakit (Ditinjau Dari Hukum Perjanjian)*. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
- C B Kusmaryanto, 2022, *Bioetik Fundamental*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Desriza Ratman, 2014, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik KEdokteran dan Malapraktek Medik*, Keni Media, Bandung.
- J Guwandi, 2003, *Inform consent dan Inform Refusal*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafind, Jakarta.
- Rospita Adelina Siregar, 2020, *Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi: Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Yuanto, 2009, *Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Tesis Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

B. Jurnal

- Christina Julia M dan Theodorus H W Lumunon, 1 Juli 2023, *Aspel Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis dan Pasien*. *Lex Privatum Vol.XII/No.1/jul/2023* dikutip 19 Februari 2024
- Dian Mauli, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit kepada Pasien*, Cepalo: *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni* h
- M Fakih, 2013, *Kedudukan Hukum Tenaga Keperawatan Dependen Dalam Transaksi Terapeutik*, *Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013*, dikutip 2 Januari 2023
- Widodo Tresno, 2015, *Penafsian Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malapraktek Medik*. *Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015*
- Wahyudi, Setya, 2011, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Medis Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan*, *Jurnal Dinamika Hukum 11, No. 3 (2011): 505*.

C. Internet

- Julie Brightwell dan Richard Cahill, 2021, *Terminating Patient Relationships, Terminating Patient Relationships (thedoctors.com)*, diakses 2 April 2024.
- tahun 2012